



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKA BELITUNG  
**SUB UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKA BELITUNG

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : AZIZ FALAHUDIN
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 655604

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 891.787.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/200 m2 di KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 329.787.000
2. Tanah Seluas 105 m2 di KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 327.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m2/10 m2 di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m2/10 m2 di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 178.600.000

1. MOBIL, CHEVROLET SPARK PREMIER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 178.600.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 54.500.000

**D. SURAT BERTHARGA**

Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 143.675.932

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ---

**Sub Total**

Rp. 1.268.562.932

**III. HUTANG**

Rp. 200.050.254

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 1.068.512.678

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.